

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Politik Uang

a. Pengertian Politik Uang

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih atau seseorang dengan memberikan imbalan materi yang diberikan kandidat kepada pemilih.¹ Politik uang masih menjadi perdebatan oleh para ahli karena dapat dilihat dari praktik politik uang yang berbeda, terutama perbedaan penggunaan antara uang pribadi atau uang negara. Politik uang atau *money politic* merupakan proses atau upaya untuk mempengaruhi seseorang melalui imbalan materi atau dapat diartikan sebagai pembelian atau penjualan suara dalam proses politik untuk tujuan mempengaruhi suara pemilih menjelang pemilihan umum. Praktek ini dapat dilakukan dengan cara melalui sumbangan seperti uang, kebutuhan sembako dan lainnya untuk menciptakan simpati kepada masyarakat agar dapat memberikan suaranya untuk partai atau calon yang bersangkutan. Politik ini dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat, karena dapat menjadikan politik yang kotor. Selain dapat menjadikan pertikaian yang berdampak pada tindakan hukum, hal tersebut juga tidak di ridhoi oleh Allah SWT karena melanggar aturan agama. Adapun hadist yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yaitu :

عن ابن عمر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله وسلم الراشئ
والمرتشئ. (رواه الترمذي)

Dari Ibnu Umar R.a “Rasullulah S.A.W melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap”. [H.R AT Tirmidzi].

¹ Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, (Maluku Utara: Universitas Halmahera. 1999), 5

Dari hadist Rasulullah di atas, Rasulullah SAW melaknat seseorang yang melukan perbuatan yang mengandung unsur suap menyuap. Hadist tersebut juga menjadi peringatan untuk pelaku dan penerima suap agar tidak melakukannya. Sekecil apapun suapnya, Rasulullah melaknat perbuatan tersebut. Tidak hanya agama yang melarang, tindakan politik uang juga melanggar aturan pemilu. Politik uang sangat tidak disukai oleh Rasulullah karena merupakan perbuatan yang lebih mendapatkan keburukan daripada manfaat.

Politik uang adalah istilah yang khas negara Indonesia untuk menerangkan semua jenis perilaku korupsi pada saat pemilu. Para analisis dan pakar politik menyatakan politik uang terjadi secara massif dan akan mempengaruhi pemikiran pemilih. Akibatnya, pemimpin yang dipilih dalam proses ini bukan pilihan terbaik, tetapi pemimpin yang banyak menggelontorkan dana untuk tujuan membeli suara akan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Politik uang atau *money politic* adalah proses atau upaya untuk mempengaruhi seseorang melalui imbalan materi atau dapat diartikan sebagai pembelian atau penjualan suara dalam proses politik untuk tujuan mempengaruhi suara pemilih menjelang pemilihan umum. Agama Islam melarang adanya praktik politik uang karena termasuk pada kategori Risywah atau suap-menyuap yaitu pemberian barang atau sesuatu dengan cara yang tidak baik.

Menurut Ustadz Abdul Somad selaku Ulama di Indonesia mendukung adanya larangan politik uang. Ustad Abdul Somad dalam dakwahnya menyatakan bahwa praktik politik uang merupakan bentuk dari sogokan dan suap yang termasuk perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Larangan tersebut diperuntukkan bagi pemberi suap ataupun penerima suap. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi yang berbunyi:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي و المرتشي

Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan menerima sogokan. (HR Abu Dawud).

KH Ma'ruf Amin juga mendukung adanya larangan praktik politik uang dan pemberian imbalan dari calon kandidat kepada pemilih. Perbuatan memberi dan penerima dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya haram dan termasuk risywah atau suap.

b. Politik Uang Menurut Para Ahli

Praktik politik uang memang sudah menjadi budaya di Indonesia pada saat pemilihan umum berlangsung. Politik uang merupakan suatu cara untuk mempengaruhi seseorang melalui imbalan materi. Adapun pengertian politik uang menurut para ahli yaitu:

- 1) Menurut Juliansyah, politik uang merupakan suatu upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan melalui imbalan materi. Politik uang juga dapat diartikan sebagai jual beli suara dalam proses pemilihan umum dan merupakan tindakan membagikan uang secara pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.²
- 2) Menurut Ismawan, politik uang merupakan suatu upaya seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan melalui imbalan tertentu. Politik uang juga diartikan sebagai sarana jual beli suara dari pemilihan Kepala Desa sampai pemilihan umum suatu negara.³
- 3) Menurut Ahmad, politik uang merupakan suatu tawaran dari calon kandidat kepada pemilih, dimana proses jual beli suara dapat menjadikan keputusan sebagai penggerak perubahan.⁴

² Juliansyah, *PILKADA : Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju. 2007), 71

³ Ismawan, *Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Persindo. 1999), 21

⁴ Ahmad, *Pilar Demokrasi Kelima*, (Yogyakarta: Budi Utama. 2015), 45

c. Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang

Politik uang sudah banyak dikenal di masyarakat Indonesia, tentunya ada beberapa penyebab terjadinya politik uang yaitu:

- 1) Sudah menjadi budaya
Politik uang memang tidak diajarkan oleh nenek moyang kita, tetapi politik uang tampaknya sudah menjadi budaya di negara Indonesia terutama bagi kelompok masyarakat yang mempunyai banyak uang. Dalam sejarah, sering menjumpai sejak zaman kolonial dahulu, para penjajah menyuap pejabat pribumi untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Kebiasaan tersebut ternyata ditiru dan lebih parahnya lagi berlanjut sampai sekarang.
- 2) Haus akan kejayaan
Manusia kadang saja terlena dengan kejayaan, yang bisa dimulai dari kekuasaan, kekayaan bahkan jabatan. Untuk mendapatkannya, seseorang rela melakukan apa saja yang diinginkan, bahkan mengambil jalan belakang jika diperlukan. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan yaitu dengan memberikan sesuatu berupa uang atau barang agar niatnya dapat terlaksana.
- 3) Lingkungan yang mendukung
Sudah tidak rahasia lagi bahwa praktik politik uang dan suap menyuap merupakan suatu jaringan yang sudah terorganisir, dari institusi kecil hingga pejabat-pejabat tinggi. Pengadilan merupakan lingkungan yang sangat rentan untuk suap menyuap, tentu saja yang menjadi target adalah hakim.
- 4) Hukum yang bisa dibeli
Hukum di Indonesia bisa diartikan hukum yang dapat dibeli dengan uang. Bukan berarti bahwa hukumnya yang salah, tetapi oknum penegak hukum yang melanggar peraturan yang menjadikan hukum di Indonesia bisa dibeli bagi orang yang banyak uang. Dengan cara menyuap hakim bahkan penjaga tentara dengan bujukan

akan dikasih sejumlah uang, maka bisa jadi terdakwa dapat menikmati kehidupan mewah dipenjara. Bisa jadi masa hukuman bisa dipersingkat dan segera menghirup udara bebas.

5) Lemah iman

Manusia dapat disibukkan dengan dunia ini, sementara untuk urusan akhiratnya menjadi lemah, hatinya menjadi terikat akan kesenangan dunia. Setiap manusia harus dapat menyadari penyebab lemahnya iman. Allah SWT berfirman :

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT melindungi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nya kalian akan dihimpunkan” (QS. Al-Anfal : 24)

Iman lemah secara langsung akan membuat seseorang bisa jauh dari Allah SWT. Hal tersebut adalah faktor utama yang dapat menyebabkan seseorang sangat mudah dalam melakukan suap menyuap.

6) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan politik

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti apa itu politik, bentuk politik, serta masalah yang timbul di politik. Hal tersebut disebabkan karena jarang ada pembelajaran tentang pendidikan politik di sekolah atau sosialisasi di masyarakat, atau juga dapat disebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap pendidikan politik di Indonesia. Sehingga pada saat pesta demokrasi seperti pemilu, masyarakat Indonesia akan bersikap acuh terhadap pemilu.

d. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Politik uang merupakan salah satu praktik politik yang dapat mewujudkan terjadinya korupsi. Proses politik uang itu sendiri adalah untuk mempengaruhi seseorang melalui imbalan materi atau dapat diartikan juga sebagai pembelian atau penjualan suara kepada pemilih pada saat proses pemilihan umum. Adapun bentuk politik uang yaitu:

1) Berbentuk uang

Uang merupakan bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Uang juga dapat mempengaruhi dan mengendalikan seseorang untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Bentuk politik uang yang sering terjadi di kehidupan masyarakat yaitu pertama untuk sarana kampanye, cara ini dilakukan dengan mencari dukungan dari masyarakat melalui penyebaran baliho, brosur dan kaos. Setelah acara selesai, para relawan diberi uang untuk pengganti uang transport. Kedua, tindakan politik uang. Cara ini dilakukan dengan memberikan sumbangan uang kepada para kandidat untuk diberikan kepada masyarakat. Ketiga, bantuan secara langsung. Cara ini dilakukan dengan memberikan dari calon kandidat kepada komunitas atau kelompok tertentu dengan mengirimkan proposal dan menyebutkan barang atau jenis bantuan yang diinginkan, kemudian jika proposal tersebut dikabulkan maka secara langsung pemilih harus wajib memberikan suaranya kepada calon kandidat.

2) Berbentuk fasilitas umum

Memberikan fasilitas umum dapat dilakukan oleh para calon kandidat untuk menarik simpati masyarakat karena dapat digunakan jangka panjang. Contoh fasilitas umum yang biasa digunakan yaitu pembangunan masjid atau

mushola, jalanan di gang kecil, transportasi umum dan lainnya.⁵

2. Sosialisasi Politik

a. Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses belajar seseorang atau anggota masyarakat yang menyampaikan nilai penting di dalam tema sosialisasi yang disampaikan. Sosialisasi Politik menurut Ramlan Subakti merupakan metode atau cara penyampaian pesan tentang nilai-nilai politik yang dibagi menjadi dua yaitu pendidikan dan indoktrinasi politik.⁶ Artinya, sosialisasi politik merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang didalamnya mempunyai tujuan untuk membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui aktivitas politik dan system politik yang ada.⁷ Salah satu contoh dalam pendidikan politik di Indonesia adalah sedari kecil sudah diajarkan tentang konsep Bhineka Tunggal Ika dan sudah ditanamkan nilai-nilai Pancasila waktu di sekolah. Hal tersebut sudah memperlihatkan proses pengenalan serta pendalaman nilai politik yang kemudian menjadi pemahaman dan berkesinambungan bagi masyarakat.

Sosialisai politik dapat diartikan sebagai proses pengenalan masyarakat kepada situasi lingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi politik juga merupakan bagian penting dari suatu system politik, karena dengan adanya sosialisasi politik seseorang dapat belajar tentang proses politik yang dialami atau dirasakan.⁸

⁵Umam Ahmadi, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Resail. 2006), 67

⁶ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1999), 117

⁷ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 154

⁸Efriza, *Political Explore. Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), 17

Bawaslu selaku penyelenggara sosialisasi politik ini mempresentasikan usaha pemerintah untuk menumbuhkan pemahaman nilai, sikap dan perilaku politik kepada masyarakat. Teori sosialisasi politik digunakan sebagai landasan untuk berfikir dalam pembahasan penelitian mengenai usaha Bawaslu Kudus dalam melakukann acara programnya yaitu dalam pembentukann Desa Anti Politik Uang. Didalam program Bawaslu tersebut sosialisasi politik dapat diperumpamakan sebagai jembatan penghubung yang memberi nnilai politik dan budaya politik kepada generasi penerus. Di dalam sosialisasi politik terdapat hal penting yang berhubungan dengan proses dan tujuan yang diinginkan dalam perpolitikan di suatu negara, dengan kata lain sosialisasi politik mempunyai hubungan yang erat dengan pengetahuan mengenai nilai, sikap kepercayaan politik serta harapan politik.⁹

b. Agen Sosialisasi Politik

Peranan agen atau aktor penyelenggara sosialisasi politik merupakan elemen terpenting dalam sosialisasi politik karena sangat bereran penting dalam memberi pengetahuan tentang segala aspek politik, seperti nilai norma perilaku berdasarkan pengetahuan dan informasi yang sudah didapatkan melalui agen sosialisasi politik.¹⁰ Ada beberapa agen sosialisasi politik di dalam masyarakat, yaitu:

1) Keluarga

Keluarga merupakan agen sosialisasi politik yang pertama untuk membentuk kepribadian seseorang, di dalam keluarga juga memiliki peran yang besar untuk membentuk kepribadian yang berkepemimpinan. Sosialisasi dimulai dari keluarga sendiri kemudian berlanjut di masyarakat.

⁹ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan dan Mahasiswa*, (Jakarta: Guepedia Publisher, 2008), 7

¹⁰ M.Teguh Wibowo dan Effendi Hasan, *Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula di Lingkungan Keluarga*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, Vol.2 No.2, 538-539.

2) Sekolah

Sekolah merupakan agen sosialisasi politik yang mempunyai kontribusi besar dalam menyempurnakan sosialisasi yang sebelumnya dari keluarga. Salah satunya pendidikan politik yang dapat memberikan pembelajaran terkait perpolitikan kepada mahasiswa.

3) Pemerintah

Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik yang memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan politik. Pemerintah juga merupakan agen yang berkepentingan langsung terhadap sosialisasi politik. Pemerintah adalah penyelenggara sistem politik dan memiliki tugas untuk tetap menjaga stabilitasnya yang biasanya melibatkan diri dalam pendidikan politik. Salah satu contohnya beberapa mata pelajaran ditujukan untuk memperkenalkan siswa kepada sistem politik pemerintahan, negara, lagu wajib nasional dan lainnya. Secara tidak langsung pemerintah melakukan sosialisasi politik melalui tindakannya.

4) Kelompok pergaulan

Kelompok pergaulan merupakan agen sosialisasi politik yang memiliki kemampuan untuk memberi motivasi agar dapat aktif dalam bidang politik. Kelompok pergaulan ini mempunyai sifat yang tidak formal sehingga sangat mudah untuk menyesuaikan pendapat masing-masing anggota kelompok. Salah satu contohnya interaksi antar teman seperti memberikan motivasi untuk aktif dalam aktivitas politik.

5) Media Massa

Media massa adalah agen sosialisasi politik yang modern, media komunikasi yang beragam seperti halnya elektronik handphone, internet, radio yang menyediakan berbagai macam informasi mengenai pendidikan politik kepada masyarakat. Salah satu contohnya yaitu seperti penyiaran berita di tv maupun radio mengenai aktivitas politik dan diskusi politik.

6) Kontak Politik Langsung

Kegiatan yang disadari atau tidak disadari yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami proses aktivitas sosialisasi politik secara langsung. Contohnya seperti ketika calon legislatif ikut serta dalam berkampanye karena berinteraksi langsung dengan aktivitas partai.

Jika dikaitkan pembahasan agen sosialisasi politik dengan bahasan penelitian mengenai strategi Bawaslu Kudus dalam mencegah *money politic* melalui pembentukan Desa Anti Politik Uang, Bawaslu tergolong dalam agen kontak politik secara langsung. Beberapa agen politik seperti keluarga, sekolah, pemerintah, kelompok pergaulan dan media masa sangat berperan sebagai agen sosialisasi yang dapat berpengaruh dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.

c. Tujuan Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik sangat berkaitan dengan teori pendidikan politik yang dapat membentuk dan menanamkan kepribadian dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik, sebagaimana dengan pendidikan politik yang memiliki fungsi untuk membangun kemampuan dan membentuk pola pikir masyarakat untuk aktif dalam berpolitik, sehingga perilaku sadar akan berpolitik dapat diterima dan bisa dipraktikkan dalam system politik.¹¹ Ada beberapa aspek tujuan sosialisasi politik yaitu:

1) Membangun Kepribadian Politik

Sosialisasi politik dalam membangun kepribadian politik mengarah pada pemahaman nilai dan isi yang di anut dalam suatu negara, pemahaman tentang perilaku yang dijadikan sebagai landasan dalam mengembangkan diri sehingga dapat membentuk kepribadian dalam kehidupan berpolitik. Melalui pendidikan politik masyarakat diharapkan menjadi warga yang

¹¹ Ahmad Dzakirin, *Tarbiyah Siyasiyah*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 25

memiliki keterampilan serta bertanggungjawab dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandaskan atas nilai dan norma yang berlaku.

2) Kesadaran Politik

Kesadaran politik merupakan kondisi yang mana seseorang tanggap dalam suatu hal.

Melalui tujuan sosialisasi politik yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dapat meningkatkan kedewasaan, kemandirian politik dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik. Serta memaksimalkan partisipasi politik yang berdemokrasi baik fungsi pada masyarakat dan mengembangkan system politik yang demokratis berlandaskan Pancasila.

3. Pendidikan Politik

a. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk membentuk nilai moral individu dan orientasi politik. Pendidikan politik ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Agar masyarakat benar-benar memahami dan mengamalkan nilai-nilai etika dalam politik. Pendidikan politik berbeda dengan sosialisasi politik. Tujuan pendidikan politik adalah untuk memungkinkan masyarakat bertindak secara kompeten. Tidak hanya dapat memahami perilaku politik, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ketidaktahuan masyarakat tentang berpolitik dapat mencerminkan bahwa pendidikan politik belum berperan maksimal di dalam sebuah negara. Oleh karena itu, negara sangat berkepentingan dengan pendidikan di masyarakatnya. Sehingga pendidikan harus diutamakan dan direncanakan dengan sebaik mungkin. Pendidikan politik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat

mengetahui arti dan fungsi dari politik itu sendiri. Ada beberapa pengertian pendidikan politik menurut para ahli:

- 1) Menurut Alfian, pendidikan politik merupakan usaha menyadarkan masyarakat untuk mengetahui proses sosialisasi politik, sehingga masyarakat memahami betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu system politik yang akan dibangun.¹²
- 2) Menurut Almond, pendidikan politik merupakan bentuk pendidikan untuk seseorang dengan kader untuk mendapatkan kemenangan politiknya.
- 3) Menurut R Hayer, pendidikan politik merupakan upaya edukatif yang sistematis untuk membentuk individu akan sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bias bertanggungjawab dalam mencapai tujuan politik.¹³

Jadi pendidikan politik dapat diartikan proses penanaman nilai pendidikan politik untuk membentuk individu yang sadar politik, agar warga negara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran hak, kewajiban dan tanggungjawab.

b. Fungsi Pendidikan Politik

Politik dapat diartikan sebagai aktivitas atau proses menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan dan keputusan yang sah. Keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas politik dapat ikut menentukan pembuatan peraturan dan keputusan yang berlaku dimasyarakat. Contohnya pada saat memilih seorang pemimpin, jika pemimpin tersebut terpilih dalam pemilihan umum tentunya memiliki hak untuk menentukan peraturan dan kebijakan yang ada didalam masyarakat dan harus megikutinya. Pada pelaksanaan pemilu sangat dibutuhkan adanya pendidikan politik, bukan hanya sekedar memberikan pemahaman tentang teknik dan tata cara pencoblosan, namun bias bertujuan

¹² Muhammad Rusli Karim, Peranan ABRI Dalam politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia, (Jakarta: CV Haju Massagung, 1989), 10

¹³ Kartini Kartono, Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa, (Bandung, Mandar Maju, 1996), 63

untuk menyentuh nilai atau norma yang lebih mengarah pada peran atau arti penting pemilu. Adapun tujuan pendidikan politik yaitu :

- 1) Dengan adanya pendidikan politik diharapkan masyarakat Indonesia bisa memahami nilai ideal yang sudah terkandung dalam system politik yang sedang diterapkan.
- 2) Dengan adanya pendidikan politik ini masyarakat Indonesia tidak hanya tahu saja tetapi juga diharapkan untuk menjadi warga negara yang mempunyai kesadaran politik dan mampu mengemban tanggungjawab yang dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan partisipasi di dalam dunia politik.

Pendidikan politik memiliki makna yang sangat penting karena dapat mendorong agar warga negara Indonesia dapat memiliki pengetahuan tentang politik, sekaligus menyadarkan masyarakat akan pentingnya system politik yang baik. Jadi fungsi dari pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi dengan maksimal dalam berpolitik.

Pendidikan politik juga diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus di dalam sosialisasi mengenai Desa Anti Politik Uang yang diselenggarakan di Desa Piji. Pendidikan politik ini sangat berkaitan karena dapat membangun generasi muda yang sadar akan politik, sadar akan hak dan kewajiban politik terhadap kepentingan bangsa dan negara. Pendidikan politik mendorong masyarakat desa Piji agar melakukan perbaikan dan peningkatan terharap jaringan politik serta membahas tentang konflik yang ada di dalam masyarakat desa Piji. Dengan adanya pendidikan politik masyarakat desa piji dapat menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk mengatur masyarakat, negara dan pemerintahan. Pendidikan politik juga dapat menyadarkan masyarakat Desa Piji agar dapat bersifat terbuka dan transparansi.

B. Penelitian Terdahulu

Teori dan temuan melalui hasil penelitian sebelumnya adalah hal yang dibutuhkan untuk data pendukung. Salah satu data pendukung yang perlu dijadikan bagian dari peneliti yaitu hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang dikaji didalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis melakukan langkah untuk kajian terhadap hasil penelitian yang berupa jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Tahun	Judul/Sumber	Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian
1.	Moch Edward, Azka Abdi Amrobbi	Pendidikan Politik di dalam menegahkan politik uang melalui gerakan masyarakat desa	Teori Perilaku Politik	Dalam penelitian ini pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. Melalui pendidikan politik masyarakat desa bisa lebih paham tentang bahaya politik uang kepada masyarakat. Tidak hanya itu melalui pendidikan politik	Perbedaan yang dilakukan oleh mocha Edward, dkk ini memfokuskan tentang pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa melalui pendidikan politik. Sedangkan penelitian ini membahas tentang

				masyarakat desa juga bisa lebih mengenal lebih dekat tentang Pemilu yang luberjurdil.	strategi Bawaslu kabupaten Kudus dalam mencegah <i>money politic</i> melalui pembentukan desa anti politik uang.
2.	Nanang Yuliya Pranata	Strategi mencegah <i>money politic</i> melalui desa anti politik	Teori Partisipasi Politik	Dalam penelitian ini adanya peran civil society untuk membangun kesadaran masyarakat dengan tujuan memperbaiki citra perpolitikan yang ada di Indonesia dengan cara membentuk desa anti politik uang.	Perbedaan yang dilakukan oleh Nanang Yuliya Pranata ini yaitu penelitian Nanang Yuliya dilakukan di Desa Murtigading, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Piji

					Kabupaten Kudus.
3	Mat Supriansyah	<i>Money Politic</i> dalam pemilu menurut pandangan hukum Islam	Teori Kebijakan Publik	Dalam penelitian ini hukum Islam dan Undang-Undang menganggap bahwa <i>Money Politic</i> didalam itu termasuk perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Hukum Islam memandang <i>Money Politic</i> sebagai tindakan yang dilarang oleh syariat dan termasuk kategori riswah. Sedangkan Undang-Undang	Perbedaan yang dilakukan oleh Mat Supriansyah dengan peneliti yaitu Mat Supriansyah membahas tentang <i>Money Politic</i> dalam pemilu menurut pandangan hukum Islam. Sedangkan peneliti membahas tentang <i>Money Politic</i> dalam pandangan politik Islam.

				memandang <i>Money Politic</i> sebagai sebuah tindakan uang melanggar Undang-Undang yang mengatur dalam peraturan pemilu.	
4.	Agus riwanto, Achmad, Suranto, Sunny Ummul, Sri Wahyuni	Membangun model desa anti politik uang sebagai strategi Bawaslu Dalam mencegah Pilkada curang	Teori Perilaku Politik	Dalam penelitian ini sosialisasi Desa Anti Politik Uang dapat dijadikan modl oleh Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan Pilkada curang dan penguatan demokrasi lokal. Model ini dspat diwujudkan apabila di dukung dengan subtansi	Perbedaan yang dilakukan oleh Agus Riwanto, dkk ini memfokus kan tentang faktor penyebab terjadinya politik uang yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskina n tingkat pemahama n hukum, tingkat pendidika n, tingkat pemahama

				<p>aturan yang memadai, adanya ketaladanan dari apparatur penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum dan dukungan partisipasi aktif masyarakat. Melawan praktik politik uang merupakan agenda bersama untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat bukan hanya kesejahteraan elit semata.</p>	<p>n agama, dan lemahnya institusi dipemerintahan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang strategi Bawaslu kabupaten Kudus dalam mencegah <i>money politic</i> melalui pembentukan desa anti politik uang</p>
--	--	--	--	---	--

<p>5.</p>	<p>Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso</p>	<p>Refitalisasi pendidikan Politik Melalui Kampung anti <i>Money Politic</i></p>	<p>Teori Partisipasi Politik</p>	<p>Dalam penelitian ini esensi pendidikan politik merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat untuk bisa berkepribadian politik etis. Masyarakat diharapkan mampu memiliki kesadaran politik dan menjadi partisipan yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa dan negara.</p>	<p>Perbedaan yang dilakukan oleh Kenlies, dkk dengan peneliti yaitu membahas tentang pendidikan politik melalui pembentukan kampung anti <i>Money Politic</i> yang mampu meningkatkan kesadaran dan perilaku politik masyarakat. Sedangkan penelitian ini membahas tentang strategi Bawaslu kabupaten Kudus dalam</p>
-----------	---	--	----------------------------------	---	---

					mencegah <i>money politic</i> melalui pembentukan desa anti politik uang.
--	--	--	--	--	---

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Keterangan:

Penelitian ini berawal dari fenomena politik uang yang terjadi dimasyarakat. Di dalam pelaksanaan pemilu tentu terdapat pelanggaran-pelanggran pemilu seperti halnya politik uang. Politik uang merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang yang terdapat di Pasal 523 ayat 1-3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal tersebut membuat Bawaslu untuk membentuk Desa Anti Politik Uang. Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen tidak terpengaruh oleh berbagai partai politik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan cara melakukan sosialisasi politik dan pendidikan politik akan mendorong masyarakat agar dapat memiliki pengetahuan tentang politik dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya sistem politik yang baik. Sekaligus dapat membangun generasi muda yang sadar akan politik, sadar akan hak dan kewajiban politik terhadap kepentingan bangsa dan negara.

